

Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Diskresi Relawan Demokrasi di Kabupaten Majene

Communication Strategies and Discretion Management of Democracy Volunteers in Majene Regency

Kamelia^{1*}

¹Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Sulawesi Selatan

email: kameliameyie@gmail.com

Kata Kunci

Strategi Komunikasi
Manajemen Diskresi
Partisipasi

Keywords:

Communication Strategy
Discretionary Management
Participation

Received: Juli 2024

Accepted: Juli 2024

Published: Juli 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas relawan demokrasi di Kabupaten Majene dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memahami peran aliran kewenangan dan diskresi dalam konteks tersebut. Metode penelitian meliputi analisis kualitatif terhadap proses seleksi, pelatihan, dan distribusi sumber daya relawan demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun relawan memiliki kewenangan formal dari KPUD Kabupaten Majene, tantangan dalam mengelola diskresi dan kurangnya antusiasme masyarakat menghambat efektivitas mereka. Studi ini menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang tepat dan pengelolaan diskresi yang bijaksana untuk memperkuat partisipasi politik dan demokrasi lokal.

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of democracy volunteers in Kabupaten Majene in performing their duties and to understand the role of authority flow and discretion in this context. The research methods include qualitative analysis of the selection, training, and resource distribution processes of democracy volunteers. The findings indicate that although volunteers have formal authority from KPUD Kabupaten Majene, challenges in managing discretion and lack of public enthusiasm hinder their effectiveness. This study highlights the importance of appropriate communication strategies and prudent discretion management to enhance political participation and local democracy.



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/IPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat memainkan peran krusial dalam mengembangkan sifat inklusif dalam penyelenggaraan negara, terutama melalui proses pemilihan umum yang memberikan legitimasi pada pemerintahan terpilih. Hal ini tidak hanya memengaruhi sikap terhadap kebijakan pemerintah tetapi juga membangun kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Sensitivitas masyarakat dalam mengawal pemerintahan sangat penting untuk kemajuan demokrasi di Indonesia (SUCIPTO, 2019). Organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO), seperti yang diorganisir oleh relawan demokrasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Studi di Kabupaten Majene menunjukkan partisipasi pemilih yang signifikan, meskipun mengalami fluktuasi, tetap di atas target nasional. Relawan demokrasi bukan hanya bertindak

sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memperluas kapasitas masyarakat dalam mengakses sumber daya demokrasi (Elfitri & Suryanef, 2021). Mereka terlibat dalam menysasar kelompok rentan seperti kaum disabilitas, kelompok lanjut usia, perempuan, pemilih pemula, dan netizen, dengan tujuan meningkatkan inklusivitas sosial. Penelitian konseptual menyoroiti bahwa relawan demokrasi mencerminkan paradigma baru dalam demokrasi yang inklusif dan komunitarian. Namun, tantangan terkait independensi CSO muncul dari hubungan mereka dengan pemerintah, termasuk faktor seperti rezim politik, distribusi sumber daya, dan desentralisasi. (Nursahid, 2022)

Partisipasi publik adalah konsep yang penting dalam ilmu politik dan sosiologi, mengacu pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik, sosial, atau ekonomi suatu negara atau masyarakat. Teori partisipasi publik menyoroiti berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat dan jenis partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Faktor-faktor ini meliputi pendidikan, nilai-nilai politik, struktur sosial, serta kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik dan sosial. (Wibowo et al., 2020)

Pengorganisasian partisipasi publik sering kali melibatkan pembentukan organisasi atau gerakan masyarakat sipil (Civil Society Organizations/CSOs). CSOs merupakan entitas non-pemerintah yang berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan sosial. Mereka dapat beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, dan mewakili beragam kepentingan dan nilai-nilai sosial. (Purna & Didin, 2022)

Salah satu bentuk pengorganisasian yang efektif adalah melalui relawan demokrasi atau inisiatif serupa yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik dan kesadaran partisipasi di kalangan masyarakat. Relawan demokrasi sering kali berfokus pada pendidikan pemilih, sosialisasi kebijakan publik, dan memperluas jaringan sosial yang mendukung partisipasi aktif dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya. (Yosi Witriya, 2020)

Dalam konteks global, pengorganisasian partisipasi publik juga mencakup penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ini termasuk kampanye online, petisi digital, dan forum diskusi daring yang memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan individu (Hariyanti & Hambali, 2021). Teknologi modern ini tidak hanya memperluas akses ke informasi dan partisipasi politik tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan, privasi, dan akurasi informasi dalam proses partisipasi publik. (Elfitri & Suryanef, 2021)

Dengan demikian, teori dan praktik partisipasi publik dan pengorganisirannya terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, teknologi, dan politik global. Meningkatkan partisipasi publik tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat sipil tetapi juga sebuah kesempatan untuk memperkuat demokrasi, inklusivitas sosial, dan pemerintahan yang baik di seluruh dunia. (Hendrik, 2022)

Beberapa penelitian terdahulu mengenai partisipasi publik telah menghasilkan berbagai temuan signifikan. organisasi masyarakat sipil (CSOs) dapat efektif dalam meningkatkan partisipasi politik dengan mendorong kesadaran dan aksesibilitas informasi politik di masyarakat (Alamsyah, 2020). Studi lain oleh Rafni & Suryanef (2017) menemukan bahwa relawan demokrasi dapat berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di daerah tertentu, seperti yang terjadi di Kabupaten Majene. Peneliti lainnya juga menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dalam melibatkan kelompok rentan, seperti kaum lanjut usia, dalam proses politik (Fithriyah, 2020; Mas Indra Putra Alamsyah & Arif Nasution, 2020). Di sisi lain, penelitian saya menekankan pada pengorganisasian relawan demokrasi oleh pemerintah dalam konteks spesifik Kabupaten Majene, dengan fokus pada dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan aspek-aspek unik dari implementasi tersebut.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus intrinsik untuk mendalami implementasi relawan demokrasi di Kabupaten Majene. Metode penelitian ini melibatkan analisis single level yang fokus pada kasus tunggal, yaitu dinamika dan dampak dari keberadaan relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anggota relawan demokrasi dan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi berbagai faktor dan dinamika yang secara langsung mempengaruhi proses kerja relawan demokrasi, serta bagaimana interaksi mereka dengan lembaga pemerintah terkait dalam konteks spesifik Kabupaten Majene. Penekanan pada pendekatan kualitatif dan studi kasus intrinsik memungkinkan artikel ini untuk menyajikan analisis mendalam tentang peran relawan demokrasi dalam konteks lokal yang terbatas, memperoleh wawasan yang kaya mengenai dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah lokal. Dengan memfokuskan pada pengalaman langsung anggota relawan demokrasi dan praktisi pemilihan umum, penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas mereka dalam memobilisasi partisipasi masyarakat serta dinamika interaksi mereka dengan lembaga resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi dan Internalisasi

Relawan demokrasi di Kabupaten Majene merupakan inisiatif yang berbeda dengan CSO umumnya karena tidak muncul sebagai hasil dari dinamika sosial dan kesadaran politik masyarakat, melainkan sebagai bentukan langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene, berdasarkan surat Nomor: 02/PP.08-PU/04/7306/KPU-Kab/I/2019. Surat tersebut menyoroti beberapa aspek yang menjadi perhatian penulis, di antaranya adalah bahwa relawan demokrasi tidak dianggap sebagai bagian dari penyelenggara

pemilu dan tidak memiliki kompetensi yang jelas. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan, tidak adanya batasan yang tegas terkait kompetensi menyebabkan interpretasi yang bebas dalam proses rekrutmen, bahkan memungkinkan inklusi anggota keluarga atau kerabat tanpa jelasnya persyaratan kompetensi yang lebih spesifik. Di Indonesia, konsep keluarga dan kekerabatan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan di negara-negara Barat, yang dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam penanganan konflik kepentingan.

Meskipun demikian, dalam upaya meningkatkan representasi dan partisipasi masyarakat, relawan demokrasi telah memfokuskan rekrutmennya dengan mewajibkan setiap anggota berdomisili di wilayah setempat. Mereka juga memberikan perhatian khusus pada kelompok dengan aksesibilitas sumber daya yang rendah, seperti masyarakat di daerah pedalaman dan kepulauan, serta memberikan representasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas dan komunitas keagamaan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah menjaga independensi dan non-partisannya relawan demokrasi dalam konteks politik yang lebih luas di Indonesia, di mana praktik pemilihan umum cenderung tidak bersifat partai tetapi lebih berbasis pada hubungan patrimonial dan pengaruh kultural dengan tokoh politik tertentu. (Dzulkifli et al., 2023)

Proses seleksi anggota relawan demokrasi di Kabupaten Majene melibatkan beberapa tahap yang penting untuk memastikan integritas dan efektivitas mereka dalam mendukung proses pemilihan umum. Tahapan awal mencakup pendaftaran di mana calon relawan diminta untuk mengajukan berkas yang mencakup persyaratan umum seperti usia minimum dan latar belakang pendidikan. Meskipun ada prasyarat ini, proses seleksi tidak selalu mengedepankan aspek kompetensi yang jelas, sehingga dapat terjadi interpretasi bebas dalam penentuan anggota yang terpilih. Selain itu, terdapat tantangan terkait inklusi anggota keluarga atau kerabat tanpa batasan yang tegas, yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme relawan dalam menjalankan tugasnya. (Wakisaka, 2022)

Setelah proses seleksi, internalisasi tujuan menjadi kunci dalam mempersiapkan anggota relawan demokrasi untuk peran mereka. Tahap ini mencakup orientasi yang mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam mendukung kegiatan pemilihan umum. Internalisasi tujuan dilakukan melalui pelatihan yang menyeluruh, dimana anggota diberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya netralitas, non-partisanship, dan integritas dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan strategi komunikasi efektif dan teknik penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan. Melalui proses ini, diharapkan relawan demokrasi dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. (Yosi Witriya, 2020)

Proses seleksi dan internalisasi tujuan dalam rekrutmen relawan demokrasi di Kabupaten Majene menggambarkan implementasi praktis dari teori organisasi dan partisipasi publik. Secara teori, seleksi anggota

berdasarkan prasyarat umum seperti usia minimum dan latar belakang pendidikan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan kualitas calon relawan. Namun, tantangan muncul ketika proses seleksi tidak selalu menekankan aspek kompetensi yang jelas, yang dapat memunculkan interpretasi bebas dan berpotensi mengurangi profesionalisme serta independensi relawan dalam tugas mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya implementasi prosedur seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi untuk memastikan integritas organisasional dalam aktivitas politik. (Elfitri & Suryanef, 2021)

Setelah melalui proses seleksi, internalisasi tujuan menjadi krusial dalam mempersiapkan relawan untuk peran mereka. Teori internalisasi tujuan menyoroti pentingnya orientasi yang mendalam tentang nilai-nilai seperti netralitas, non-partisanship, dan integritas, yang harus ditanamkan kepada anggota relawan melalui pelatihan intensif. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan penyuluhan yang efektif. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa pengenalan yang mendalam terhadap tujuan organisasi serta pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis adalah kunci keberhasilan relawan dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik lokal. (sucipto, 2019)

Distribusi Sumber Daya

Setiap organisasi memiliki berbagai cara untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan programnya. Untuk CSO, sumber daya dapat diperoleh melalui swadaya anggota, kemitraan dengan organisasi lain, dan melalui bantuan hibah dari lembaga donor. Dalam swadaya anggota, CSO mengandalkan dana yang mereka galang sendiri, namun hal ini sering kali membatasi alokasi untuk program dan pengembangan sumber daya manusia, karena fokus utama adalah pada pengumpulan dana. Kemitraan dengan organisasi lain memungkinkan untuk berbagi sumber daya materi dan finansial, yang dapat mengatasi keterbatasan yang ada. Sementara itu, bantuan hibah dari lembaga donor sering kali menyediakan sumber daya yang cukup untuk program tertentu, tergantung pada kesesuaian dengan tujuan dan prioritas lembaga donor.

Berbeda dengan CSO, relawan demokrasi sebagai inisiatif masyarakat sipil yang didirikan oleh pemerintah, bergantung pada alokasi anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Majene. Anggaran untuk relawan demokrasi termasuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPUD setiap tahunnya. Namun, meskipun relatif terjaminnya sumber daya keuangan ini, ketergantungan pada anggaran pemerintah dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan program. Alokasi sumber daya yang tidak proporsional dapat mempengaruhi kinerja relawan demokrasi, terutama dalam memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan relevan dan efektif untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan temuan Hailey &

Salway (2016) yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber daya terbatas dapat menghambat inovasi dan mengarah pada konflik internal serta rendahnya produktivitas dalam organisasi.

Distribusi sumber daya merupakan aspek kritis dalam manajemen organisasi, termasuk dalam konteks relawan demokrasi di Kabupaten Majene. Sebagai bentukan pemerintah, sumber daya untuk relawan demokrasi disalurkan melalui alokasi anggaran yang tercatat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPUD setiap tahunnya. Namun, distribusi sumber daya ini tidak selalu merata atau proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja relawan demokrasi dalam memenuhi tujuan mereka, terutama dalam menjalankan program-program yang efektif dan relevan bagi berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda seperti pesisir, pegunungan, dan perkotaan mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam alokasi sumber daya untuk memastikan dampak yang optimal dari kegiatan relawan demokrasi.

Tidak hanya itu, distribusi sumber daya yang tidak merata juga dapat menciptakan ketidakseimbangan internal dalam organisasi. Anggaran yang tidak proporsional atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dapat menghambat kemampuan relawan demokrasi dalam merespons dinamika politik lokal dengan cepat dan efektif. Hal ini dapat mempengaruhi komunikasi internal, motivasi anggota, dan akhirnya, membatasi potensi untuk inovasi dalam strategi pengorganisasian dan penguatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pengelolaan relawan demokrasi untuk memperhatikan distribusi sumber daya secara cermat, dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan sumber daya lainnya mendukung secara optimal tujuan organisasi dalam mendukung proses demokrasi dan partisipasi masyarakat yang inklusif.

Distribusi sumber daya dalam konteks relawan demokrasi di Kabupaten Majene menggambarkan penerapan teori manajemen sumber daya yang penting dalam organisasi. Sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, relawan demokrasi mengandalkan alokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPUD setiap tahunnya. Namun, distribusi sumber daya ini sering kali tidak merata atau proporsional sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang ada di lapangan. Teori distribusi sumber daya menyoroti pentingnya alokasi yang bijak dan tepat untuk mendukung kegiatan operasional dan strategis organisasi. Misalnya, pengalokasian sumber daya yang tidak memadai untuk wilayah-wilayah dengan tantangan sosial-ekonomi yang berbeda seperti pesisir, pegunungan, dan perkotaan dapat menghambat kemampuan relawan demokrasi dalam merespons secara efektif terhadap kebutuhan lokal dan dinamika politik yang beragam.

Selain itu, distribusi sumber daya yang tidak merata juga dapat menciptakan ketidakseimbangan internal dalam organisasi. Teori manajemen organisasi menekankan bahwa ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks relawan demokrasi, anggaran yang tidak proporsional atau tidak memadai untuk mendukung kegiatan operasional dapat

mempengaruhi motivasi anggota, komunikasi internal, dan kemampuan untuk berinovasi dalam strategi partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas yang maksimal, penting bagi pengelolaan relawan demokrasi untuk mempertimbangkan dengan seksama distribusi sumber daya, sehingga setiap alokasi anggaran dan penggunaan sumber daya lainnya dapat secara optimal mendukung tujuan organisasi dalam mendukung demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat yang inklusif. (Ira Fatmawati, 2022; Pryastuti, 2023)

Aliran Kewenangan dan Diskresi

Efektivitas relawan demokrasi di Kabupaten Majene sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang disesuaikan dengan beragam kelompok demografis dan sosial di berbagai wilayah. Misalnya, para lansia mungkin menghadapi hambatan berbahasa formal saat sesi edukasi pemilih, sedangkan pemilih muda lebih menyukai gaya komunikasi informal. Begitu pula dengan komunitas pesisir yang mayoritas nelayan, mereka memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda dengan komunitas pertanian di pegunungan.

Di Kabupaten Majene, terdapat beberapa tantangan umum yang mempengaruhi efektivitas operasional relawan demokrasi. Pertama, ada kurangnya antusiasme di kalangan beberapa segmen masyarakat, di mana partisipasi dalam sesi edukasi pemilih terbatas hanya pada pemimpin komunitas tertentu seperti kepala desa dan pejabat lokal. Kedua, apatinya terhadap keterlibatan dalam kegiatan politik sangat umum terjadi di kalangan kelompok seperti perempuan, terutama ibu-ibu, dan pemilih pemula yang kadang menolak upaya edukasi pemilih. Ketiga, ketidakpedulian sosial selama periode pemilu — diperparah saat bulan suci Ramadan atau acara olahraga besar seperti Piala Dunia 2019—berdampak pada tingkat partisipasi pemilih. Keempat, sentimen umum bahwa memilih atau tidak memilih sama saja bagi hasil kehidupan pribadi berkontribusi pada apati pemilih yang luas. Terakhir, ketidakpuasan akibat pengalaman pemilu sebelumnya telah mengurangi kepercayaan pada lembaga-lembaga politik, yang lebih lanjut mendorong keterlibatan politik dan apati. Menyadari tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya strategi komunikasi yang disesuaikan dengan motivasi khusus audiens, karena politik kontemporer semakin bergantung pada pola komunikasi dan media yang efektif. (Mokat, 2019)

Dalam konteks relawan demokrasi di Kabupaten Majene, aliran kewenangan dan diskresi berperan penting dalam menentukan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kewenangan merujuk pada wewenang formal yang diberikan kepada relawan demokrasi, yang dalam kasus ini diperoleh dari KPUD Kabupaten Majene melalui alokasi anggaran dalam DIPA tahunan. Namun, meskipun memiliki kewenangan formal ini, relawan demokrasi sering kali harus menghadapi tantangan dalam mengelola diskresi mereka. Diskresi ini mencakup keputusan-keputusan yang harus mereka ambil dalam konteks lapangan, seperti strategi komunikasi yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat dan kondisi sosial-politik yang sedang berlangsung.

Tantangan-tantangan seperti kurangnya antusiasme dari sebagian masyarakat atau apati terhadap politik menunjukkan bahwa relawan demokrasi perlu menggunakan diskresi mereka dengan bijak dalam menyesuaikan pendekatan komunikasi dan intervensi yang mereka lakukan. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya bagi relawan demokrasi untuk tidak hanya mengandalkan pada kewenangan formal mereka, tetapi juga mampu menjalankan diskresi dengan mempertimbangkan konteks dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, studi ini menyoroti bahwa aliran kewenangan yang diberikan oleh pihak berwenang harus diimbangi dengan kemampuan relawan demokrasi dalam menggunakan diskresi mereka secara efektif, untuk mencapai hasil yang optimal dalam memperkuat partisipasi politik dan demokrasi lokal. (Hevriansyah et al., 2021)

Dalam teori organisasi, konsep aliran kewenangan dan diskresi memainkan peran krusial dalam memahami bagaimana sebuah entitas, seperti relawan demokrasi di Kabupaten Majene, dapat beroperasi dan mencapai tujuannya. Aliran kewenangan merujuk pada wewenang formal yang diberikan kepada suatu unit atau individu, dalam hal ini relawan demokrasi, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Di Kabupaten Majene, aliran kewenangan ini berasal dari KPUD Kabupaten Majene melalui alokasi anggaran dalam DIPA tahunan, yang memberikan landasan hukum dan sumber daya finansial bagi relawan demokrasi untuk melaksanakan kegiatan pemilu dan edukasi politik. Meskipun demikian, meskipun relawan demokrasi memiliki wewenang ini, mereka juga harus mengelola diskresi dalam mengambil keputusan di lapangan. Diskresi ini meliputi kemampuan mereka untuk menyesuaikan strategi komunikasi dan intervensi dengan kondisi sosial-politik lokal, seperti menanggapi tingkat partisipasi yang rendah atau apati terhadap proses politik di kalangan masyarakat. (Riameinda, 2020)

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh relawan demokrasi, seperti kurangnya antusiasme dari sebagian masyarakat atau sikap acuh terhadap pemilu, menyoroti pentingnya pengelolaan diskresi yang bijak. Teori aliran kewenangan dan diskresi menunjukkan bahwa walaupun relawan demokrasi memiliki kewenangan formal dari KPUD, keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan tergantung pada kemampuan mereka dalam menggunakan diskresi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dalam konteks manajemen organisasi, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa aliran kewenangan yang diberikan sejalan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan diskresi dengan efektif. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kemampuan organisasi dalam merespons dinamika lingkungan eksternal dengan lebih adaptif dan responsif.

KESIMPULAN

Simpulan

Efektivitas relawan demokrasi di Kabupaten Majene sangat bergantung pada strategi komunikasi yang tepat dan pengelolaan diskresi yang bijaksana dalam menjalankan tugas. Dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, relawan demokrasi dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Meskipun memiliki kewenangan formal dari KPUD Kabupaten Majene yang memberikan landasan hukum dan dukungan sumber daya finansial, relawan harus menghadapi tantangan yang signifikan seperti kurangnya antusiasme masyarakat dan sikap apatis terhadap politik. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, tetapi juga mempengaruhi efektivitas relawan dalam mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kemampuan mereka dalam menyesuaikan strategi komunikasi dan intervensi dengan kondisi sosial-politik lokal sangat penting untuk memperkuat partisipasi politik dan demokrasi lokal. Strategi komunikasi yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik demografis dan sosial masyarakat, seperti lansia yang membutuhkan bahasa formal yang lebih mudah dipahami atau pemilih muda yang lebih menerima gaya komunikasi informal. Selain itu, diskresi yang bijaksana dalam mengambil keputusan lapangan juga merupakan faktor kunci dalam menghadapi dinamika sosial-politik yang berubah-ubah dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan dan efektif. Melalui pendekatan yang adaptif dan responsif ini, diharapkan relawan demokrasi dapat mengatasi tantangan yang ada dan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Majene.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas relawan demokrasi di Kabupaten Majene, disarankan agar proses seleksi dan pelatihan lebih menekankan pada kompetensi dan independensi calon relawan. Selain itu, distribusi sumber daya harus lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan, serta memastikan bahwa setiap alokasi mendukung tujuan organisasi secara optimal. Pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik lokal akan membantu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik..

REFERENSI

- . Dzulkifli., Harlinda Nurdin, N., & Adia Purna, Z. (2023). Unleashing the Power of Capacity Building: Transforming Governance and Policy Implementation in the Digital Era. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14121>
- Alamsyah, M. I. P. (2020). Analisis Peran Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum di Kota Medan Tahun 2019. In *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*.
- Elfritri, M., & Suryanef, S. (2021). Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Relawan Demokrasi Basis Warganet pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 1(2). <https://doi.org/10.24036/jecco.v1i2.7>
- Fithriyah, A. A. (2020). Peran Relawan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sudoarjo. In *Satuan Tekad Menuju Indonesia*

Sehat.

- Hariyanti, H., & Hambali, H. (2021). Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1). <https://doi.org/10.24036/8851412512020490>
- Hendrik, H. (2022). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DI SEKOLAH. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 15(1). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v15i1.592>
- Hevriansyah, A., Erliyana, A., & Tangkudung, A. (2021). Diskresi Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa pada Putusan Nomor:60/G/2019/PTUN-BDG. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(01). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i1.204>
- Ira Fatmawati. (2022). Komunikasi Organisasi Dalam Hubungannya Dengan Kepemimpinan Dan Perilaku Kerja Organisasi. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 2(1). <https://doi.org/10.62825/revorma.v2i1.18>
- Mas Indra Putra Alamsyah, & Arif Nasution. (2020). Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Pemilih Disabilitas Dalam Menaikkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik di Kota Medan Pada Pemilihan Umum 2019. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(2). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.917>
- Mokat, J. E. H. (2019). Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI)*, 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.997>
- Nursahid, F. (2022). MEMBANGUN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG SEHAT DAN AKUNTABEL. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.33822/jpds.v3i1.5924>
- Pryastuti, L. (2023). Dinamika Suatu Organisasi dalam Perubahan dan Pengelolaan Stress. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Purna, Z. A., & Didin, D. (2022). Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik? *Jurnal Arajang*, 5(1). <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2731>
- Riameinda, D. (2020). Tata Kelola Pemilu Di daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara). *Elektoral Governance Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, 2.
- SUCIPTO, D. (2019). PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut). *Jurnal Yustisiabel*, 3(2). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.399>
- Wakisaka, D. (2022). Beyond street-level bureaucracy: the organisational culture of migration policy-making and administrative elites. *International Migration*, 60(4). <https://doi.org/10.1111/imig.12919>
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>
- Yosi Witriya. (2020). Efektivitas Relawan Demokrasi Di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019. In *UIN Raden Fatah Palembang. At-Taubah* (Vol. 1).